

Analisis SWOT dan TOWS Sebagai Landasan dalam Perencanaan Strategis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan di Kabupaten Bandung Barat

Mirna Rahmawanti¹, Hastuti²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : mirna.rahmawanti.amp15@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : hasututi@polban.ac.id

ABSTRAK

Saat ini proses pencatatan dan penilaian persediaan yang berjalan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat masih dilakukan secara konvensional dengan bantuan *Ms. Excel*. Permasalahan kemudian timbul ketika Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat secara berulang kali tidak dapat menyajikan laporan mutasi persediaan yang akurat dan tepat waktu kepada BPKD. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya pemahaman pengelola akuntansi persediaan di lingkungan Dinas Kesehatan, karena aktivitas tersebut dilakukan oleh SDM yang bukan di bidangnya. Padahal perkembangan teknologi dan sistem informasi yang semakin pesat saat ini, bisa dijadikan peluang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dalam merumuskan suatu sistem informasi yang dapat melakukan proses pencatatan dan penilaian persediaan secara cepat, tepat dan akurat. Untuk itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah merumuskan perencanaan strategis untuk menghasilkan berbagai alternatif sistem informasi pencatatan dan penilaian persediaan yang efektif dan efisien, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan matriks SWOT dan TOWS. Kemudian, untuk metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Yang mana hasilnya menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat perlu mengganti sistem yang konvensional saat ini menjadi sistem informasi yang terkomputerisasi, bisa berbasis desktop ataupun berbasis web.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Persediaan, SWOT, TOWS, Perencanaan Strategis

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meski pos persediaan nilainya di neraca tidak sebesar aset tetap, tetapi transaksi yang berhubungan dengan persediaan merupakan aktivitas yang paling sering terjadi, sehingga persediaan merupakan salah satu akun yang likuiditasnya tinggi dan posisinya berperan penting terhadap kewajaran laporan keuangan. Karena, apabila pengelolaannya tidak tertib persediaan bisa menjadi salah satu penghambat pemerintah daerah dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti halnya yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat adalah SKPD yang membawahi 3 RSUD, UPT Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan, 32 puskesmas, 54 puskesmas pembantu (pustu) dan 34 puskesmas keliling (pusling). Dalam melakukan proses pencatatan dan penilaian persediaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat memilih

untuk menerapkan cara yang konvensional menggunakan bantuan *Ms. Excel*. Hal ini tentunya sangat tidak efisien, mengingat persediaan di Dinas Kesehatan sangatlah banyak dan jenisnya yang tergolong dalam persediaan khusus. Terlebih, kurangnya pemahaman pengelola akuntansi persediaan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, karena aktivitas tersebut dilakukan oleh SDM yang bukan di bidangnya. Sehingga hal tersebut memicu timbulnya berbagai permasalahan, salah satunya adalah kesalahan dalam menetapkan nilai HPP (Harga Pokok Persediaan).

Kesalahan dalam menetapkan nilai HPP ternyata berdampak pada kekeliruan informasi yang disajikan dalam laporan mutasi persediaan. Akibatnya, penyajian akun persediaan menjadi tidak wajar, sehingga menurunkan akuntabilitas dari LKPD. Padahal perkembangan teknologi dan sistem informasi yang semakin pesat saat ini, bisa dijadikan peluang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dalam merumuskan suatu sistem informasi yang dapat melakukan proses pencatatan dan penilaian persediaan secara

cepat, tepat dan akurat. Sehingga, tidak perlu lagi menerapkan model pencatatan yang konvensional. Namun demikian, untuk memulai penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi diperlukan suatu proses analisis yang matang, agar sistem informasi yang digunakan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan lingkungan instansi. Sehingga, tidak terjadi kebingungan ataupun kesulitan ketika memulai penerapan sistem informasi tersebut.

Oleh karena itu, proses analisis sistem informasi sebelum tahap penerapan menjadi hal yang sangat penting. Karenanya untuk membantu proses analisis tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat perlu membuat Perencanaan Strategis Sistem Informasi (PSSI) yang di dalamnya berisi sejumlah alternatif teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Namun demikian, langkah tersebut harus diikuti dengan metode pendekatan yang tepat seperti metode analisis SWOT dan TOWS, agar menghasilkan rencana strategis yang berjangka panjang dan mampu mendukung perkembangan teknologi sampai 5 atau 10 tahun ke depan. SWOT atau kependekan dari *Strengths*, *Weakness*, *Opportunity* dan *Threats* merupakan salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengetahui peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi, yang kemudian disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Biasanya metode ini menggunakan panduan atau kerangka yang sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan, sehingga menghasilkan *output* yang terarah dan fokus terhadap hal yang ingin dicapai. Sedangkan TOWS merupakan analisis lanjutan dari analisis SWOT yang mengkombinasi unsur kekuatan (*Strengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Dengan demikian, kita dapat meminimalisir suatu ancaman dan merebut suatu peluang dalam menghasilkan berbagai alternatif sistem informasi yang efektif dan efisien dalam melakukan proses pencatatan dan penilaian persediaan untuk diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Proses analisis sistem informasi tersebut selanjutnya penulis wujudkan dalam sebuah penelitian yang berjudul: “**Analisis SWOT dan TOWS sebagai Landasan dalam Perencanaan Strategis Sistem Pencatatan dan Penilaian Persediaan di Kabupaten Bandung Barat**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal apa yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dalam

melakukan proses pencatatan dan penilaian persediaan?

2. Faktor Eksternal apa yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan proses pencatatan dan penilaian persediaan?
3. Bagaimana perencanaan strategis sistem informasi pencatatan dan penilaian persediaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor internal yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan proses pencatatan dan penilaian persediaan.
2. Mengetahui faktor eksternal yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan proses pencatatan dan penilaian persediaan.
3. Membuat perencanaan strategis sistem informasi pencatatan dan penilaian persediaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

Sarosa (2009:13)^[7] menjelaskan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat keputusan. Sedangkan Krismiaji (2010:3)^[2] mengartikan Sistem Informasi Akuntansi sebagai sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis.

2.2 Perencanaan Strategis SI/TI

Perencanaan strategis SI/TI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategis SI/TI mempelajari pengaruh SI/TI terhadap kinerja bisnis dan kontribusinya bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan strategis SI/TI juga menjelaskan berbagai tools, teknik dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi SI/TI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif (Ward & Peppard, 2003)^[9].

2.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 2009)^[5]. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Univeritas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an.

2.4 Analisis TOWS

Analisis TOWS merupakan analisis lanjutan dari analisis SWOT yang mengkombinasi unsur kekuatan (*Strenghts*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) menjadi 4 (empat) strategi yaitu: SO, WO, ST dan WT.

2.5 Persediaan

2.5.1 Definisi Persediaan

Dalam PSAP No. 5 Paragraf 4^[4] dijelaskan bahwa yang dimaksud persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2.5.2 Sistem Pencatatan Persediaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2010 terdapat 2 (dua) metode sistem pencatatan persediaan, yaitu:^[3]

1. Metode Perpetual
Dalam metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu diperbaharui. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama yang sifatnya *continues* di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat.
2. Metode Periodik
Dalam metode periodik, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan/terjadi pemakaian, sehingga tidak memperbaharui jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan

untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD.

2.5.3 Sistem Penilaian Persediaan

Dalam upaya menyajikan saldo akun persediaan yang wajar, maka setiap mutasi persediaan yang masuk atau pun keluar harus dinilai dengan tepat oleh pemerintah daerah. Berdasarkan PSAP No. 05 Paragraf 17 terdapat tiga metode sistem penilaian persediaan, yaitu:^[4]

1. Metode FIFO (*First In First Out*)
Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang-barang digunakan (dikeluarkan) sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode ini mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang yang pertama yang digunakan atau dikeluarkan.
2. Rata-Rata Tertimbang
Dalam metode ini barang yang dipakai dibebani harga pokok rata-rata. Perhitungan harga pokok rata-rata dilakukan dengan cara membagi jumlah harga perolehan dengan kuantitasnya. Artinya harga perolehan barang di gudang ditambah harga perolehan barang yang baru dibeli dibagi kuantitas. Hasil pembagian inilah yang akan digunakan sebagai pedoman menghitung harga pokok penjualan.
3. Metode Harga Perolehan Terakhir (HPT)
Metode ini merupakan kebalikan dari metode FIFO. Metode Harga Perolehan Terakhir mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, barang yang paling terakhir dibeli akan dikeluarkan lebih dulu. Harga perolehan barang yang dibeli terakhir akan dialokasikan lebih dahulu sebagai harga pokok pengeluaran.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Penyelesaian Masalah

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis SWOT menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana model ini melakukan pendekatan secara sistematis, faktual dan akurat dalam memaparkan suatu fenomena dan menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data triangulasi. Triangulasi adalah metode yang menggabungkan beberapa metode pengumpulan data yang ada (Sugiyono, 2015)^[8]. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah gabungan antara:

1. Observasi
Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
2. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden.
3. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung, yaitu dengan cara melakukan penelusuran data historis pada objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini berupa data subjek, fisik dan dokumenter. Yang mana data subjek yang dianalisis berisi opini, sikap, pengalaman atau karakteristik narasumber dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pelaksanaan pencatatan dan penilaian persediaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Data fisik berupa benda berwujud yang dapat menjadi bukti keberadaan pelaksanaan pencatatan dan penilaian persediaan. Dan data dokumenter yang berupa daftar permintaan persediaan, surat bukti masuk/keluar persediaan, buku persediaan, laporan persediaan, kartu perhitungan fisik, bukti memorial, faktur pembelian dsb. Sedangkan sumber datanya diperoleh secara langsung (data primer).

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian

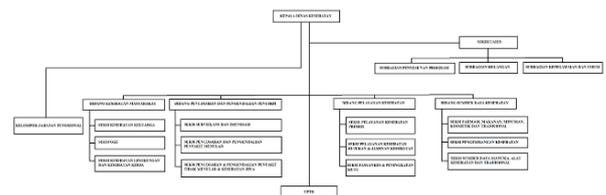
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari s/d 31 Mei 2019. Sedangkan tempat yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) di Ged. C Lt. 3 dan kantor Dinas Kesehatan di Ged. A Lt. 2 lingkungan kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jl. Padalarang-Cisarua km 2 Ds. Mekarsari Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, Jawa Barat (40552).

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat adalah SKPD yang membawahi 3 RSUD, UPT Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan, 32 puskesmas, 54 puskesmas pembantu (pustu) dan 34 puskesmas keliling (pusling). Berlokasi di Ged. A Lt. 2 lingkungan kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jl. Padalarang-Cisarua km 2 Ds. Mekarsari Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, Jawa Barat (40552). Dinas kesehatan Kabupaten Bandung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan wajib pemerintahan di bidang kesehatan yang diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2007 dan melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas-tugas Dinas Kesehatan.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, maka dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang digambarkan melalui struktur organisasi berikut ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

4.2 Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, Treats)

Analisis SWOT ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menghasilkan berbagai alternatif sistem informasi yang efektif dan efisien, untuk diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Adapun hasil analisis SWOT sistem pencatatan dan penilaian persediaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Matriks SWOT

Internal	Strength 1. Tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan 2. Tersedia fasilitas seperti komputer dan printer 3. Tersedia layanan akses internet dan jaringan (LAN) 4. Dukungan dari pimpinan 5. SDM yang masih fresh	Weakness 1. Proses Pencatatan dan Penilaian Persediaan masih dilakukan secara manual 2. Data belum terdatabase 3. Proses penyajian laporan mutasi persediaan memerlukan waktu yang lama 4. Informasi yang disajikan dalam laporan mutasi persediaan tidak akurat 5. Tidak ada dokumentasi SOP 6. Keamanan data belum optimal, sehingga siapapun dapat membuka dan merubahnya 7. Tidak dapat diakses secara multiuser 8. Sulitnya mengontrol persediaan yang mendekati tanggal kedaluwarsa 9. Adanya selisih antara data stock opname dengan stock fisik 10. Tidak ada fungsi khusus untuk mengelola persediaan 11. Tanggal input data dapat direkayasa
Eksternal	Opportunity 1. Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat 2. Pemerintah daerah lainnya juga masih melakukan proses Pencatatan dan Penilaian Persediaan secara manual 3. Memiliki regulasi yang tidak begitu rumit	Threat 1. Pembagian tugas tidak jelas 2. Jumlah SDM yang berkompeten terbatas 3. Kompetisi antar pegawai 4. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat

4.3 Analisis TOWS (*Treats, Opportunity Weakness, Strengths*)

Dari *Strengths, Weakness, Opportunity* dan *Treats* yang dihasilkan pada tahap analisis SWOT, maka di tahap analisis TOWS masing-masing aspek tersebut dibandingkan sebagai bahan perencanaan strategis dalam menentukan sistem informasi yang tepat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Berikut ini adalah hasil analisis TOWS sistem pencatatan dan penilaian persediaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat:

S-O (*Strengths-Opportunity*)

- Membuat sistem informasi pencatatan dan penilaian persediaan secara terkomputerisasi
- Memanfaatkan jaringan LAN atau internet untuk membuat sistem informasi yang *multiuser*

S-T (*Strengths-Treats*)

- Memberikan pelatihan kepada para pegawai untuk melakukan proses pencatatan dan penilaian yang benar
- Mensinergikan antara perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan fasilitas komputer yang telah tersedia, untuk membentuk SDM yang berkompeten dalam segala bidang
- Memberi tugas sesuai dengan kemampuan pegawai

W-O (*Weakness-Opportunity*)

- Membuat sistem informasi pencatatan dan penilaian persediaan yang dapat menyajikan laporan mutasi persediaan dan laporan *stock opname* secara otomatis

- Membuat sistem informasi yang dapat memberi peringatan tentang tanggal kedaluwarsa persediaan secara otomatis
- Membangun *database* untuk digunakan ke dalam sistem informasi
- Membuat sistem informasi yang memiliki hak akses

W-T (*Weakness-Treats*)

- Mengurangi kompetisi antar pegawai dengan membuat dokumentasi SOP dan melakukan pembagian tugas yang jelas

4.4 Hasil Rumusan Perencanaan Strategis Sistem Informasi

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan TOWS di atas, dapat diidentifikasi kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat terhadap Sistem Informasi yang akan digunakan untuk menunjang dan meningkatkan kinerja dalam melakukan proses pencatatan dan penilaian persediaan. Untuk itu, tahap selanjutnya adalah menentukan rencana strategis yang tepat dalam mensinergikan kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tersebut dengan tren perkembangan teknologi saat ini. Berikut adalah tabel perencanaan strategis sistem informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat:

Tabel 2. Perencanaan Strategis Sistem Informasi

Tujuan	Identifikasi	Solusi SI/ TI
• Memudahkan pengelola dalam menyajikan laporan mutasi persediaan yang tepat, cepat dan akurat tanpa perlu memahami konsep Perpetual dan FIFO	• Menyediakan fitur <i>report</i> yang dapat menyajikan laporan mutasi persediaan secara otomatis • Menyediakan fitur ekspor data laporan dalam format pdf	• Sistem informasi yang terkomputerisasi
• Memudahkan pengelola dalam mengontrol persediaan yang telah mendekati tanggal kedaluwarsa.	• Menyediakan fitur yang dapat memberikan peringatan secara otomatis	• Sistem informasi yang terkomputerisasi
• Memudahkan pengelola dalam menetapkan jumlah stock persediaan yang ada di gudang.	• Menyediakan fitur yang dapat menghasilkan laporan stock opname secara otomatis	• Sistem informasi yang terkomputerisasi
• Membangun persepsi yang sama antar pengelola dalam melakukan proses pencatatan dan penilaian persediaan.	• Menyediakan sistem yang dapat digunakan secara <i>multiuser</i>	• Sistem informasi yang terkomputerisasi • Software yang mendukung pertukaran informasi secara Online atau Localhost • Software database • Software server data
• Memfasilitasi pengelola untuk melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi persediaan yang masuk maupun keluar dengan tepat waktu, tanpa menunda-nunda.	• Menyediakan fitur yang dapat melakukan input tanggal secara otomatis sesuai dengan tanggal pada saat melakukan input transaksi	• Sistem informasi yang terkomputerisasi
• Membatasi hak akses pengelola terhadap data persediaan	• Menyediakan fitur login dan logout • Menyediakan fitur tambah user dan ganti password	• Sistem informasi yang terkomputerisasi

5. KESIMPULAN

Berdasarkan tabel perencanaan strategis SI/TI yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa proses pencatatan dan penilaian persediaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sudah tidak memungkinkan bila dilakukan menggunakan *Ms. Excel*, karena fitur yang ditawarkan *Ms. Excel* tidak sesuai dengan kebutuhan dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Dimana, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat menyajikan laporan mutasi persediaan secara otomatis. Agar pengelola persediaan yang bukan dari kalangan akuntansi dapat menyajikan laporan tersebut dengan cepat, tepat dan akurat tanpa perlu memahami konsep dari Perpetual dan FIFO. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat juga membutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu memberikan peringatan dini tentang tanggal kedaluwarsa dari persediaan, sehingga pengelola akan dimudahkan dalam melakukan pengontrolan barang.

Kemudian, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat juga memerlukan suatu sistem informasi yang dapat menyajikan data *stock opname* secara otomatis, sehingga selisih antara stok fisik dengan data pada kartu persediaan tidak lagi terjadi. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat juga membutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat digunakan secara *multiuser* dengan dilengkapi fitur *username* dan *password*, sehingga tidak sembarang orang dapat mengakses data persediaan dan sekaligus menyamakan persepsi setiap pengelola dalam menyajikan laporan mutasi persediaan. Tidak hanya itu, untuk membiasakan pengelola persediaan melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi persediaan yang masuk maupun keluar dengan tepat waktu, tanpa menunda-nunda. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat memerlukan sebuah sistem informasi yang dapat menampilkan tanggal secara otomatis, sehingga *user* tidak bisa mengganti tanggal transaksi sesukanya.

Untuk mendapatkan semua fitur tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat harus mengganti sistem yang konvensional tersebut menjadi sistem informasi yang terkomputerisasi. Sistem tersebut bisa berbasis desktop maupun berbasis web seperti yang disebutkan oleh Samsinar (2015)^[6], Isov Dwi Dharmawan (2016)^[1] dan Yeni Novitasari (2017)^[10] dalam penelitiannya.

Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada seluruh pegawai Kabupaten Bandung Barat, khususnya kepada para pegawai Dinas Kesehatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang penulis butuhkan. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Akuntansi, Ketua Program Studi D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Dosen Pembimbing serta seluruh Dosen dan staff di Jurusan Akuntansi. Terima kasih juga kepada tim IRWNS Polban yang telah mempublish tulisan ini, semoga kedepannya dapat selalu turut serta berperan aktif dalam penulisan karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Isov Dwi Dharmawan. 2016. Sistem Informasi Obat di Apotek Nisa Berbasis Web. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [2] Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.64 Tahun 2010.
- [4] Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP BA) No. 05 tentang Akuntansi Persediaan pada PP No. 71 Tahun 2010.
- [5] Rangkuti, Freddy. 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [6] Samsinar dan Anggraini Putrianti. 2015. Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Persediaan Obat Studi Kasus: Apotek Aini Farma.
- [7] Sarosa, Samiaji. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Grasindo.
- [8] Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [9] Ward, John dan Joe Peppard. 2003. *Strategic Planning for Information System 3rd Edition*. England: John Willey & Sons, Ltd.
- [10] Yeni Novitasari dkk. 2017. Rancang Bangun Sistem Informasi Stok Obat Studi Kasus Apotek dr. Maulana Ak. 8(2): 16.

UCAPAN TERIMA KASIH